KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA – PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

2016

PERMENHUB NO. 15 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 104, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraa Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 38 Tahun 2015; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 78 Tahun 2010; PERPRES No. 71 Tahun 2012; PERMENHUB No. 83 Tahun 2010; PERMENKEU No. 78/PMK.06/2014; PERMENKEU No. 38/PMK.01/2006; PERMENKEU No. 260/PMK.011/2010; PERMENHUB No. 66 Tahun 2013; PERMENPPN/Bappenas No. 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012; PERMENPPN/Bappenas No. 6 Tahun 2012; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum meliputi kegiatan pengusahaan di bidang perkeretaapian, tujuan dan prinsip kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian, jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian, identifikasi dan penetapan penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian, tata cara pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya, perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya, dan pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2016 dan ditetapkan tanggal 21 Januari 2016.